

Miras tersebut hasil sitaan dari razia yang digelar Sat Narkoba Polres Bareleng dan jajaran Polsek selama sepekan terakhir. Nilai ri-

Kombes Hengki di...  
nahan, Rabu (16/5) siang.  
Polisi menyita ribuan botol mi-  
nar dari beberapa toko di Daruapi,

kriminal dan kecelakaan lalu lintas,  
yang diawali dengan mengkonsum-  
si miras," sambung Hengki.

buah bot...  
di jalanan beralaskan terpal.  
(Ke hal 12))

### EVALUASI LAYANAN KESEHATAN

## Pelayanan RSUD Masih Loyo

**BATAM KOTA** - Pelayanan RSUD Embung Fatimah dinilai belum prima sekalipun sudah menyandang akreditasi Rumah Sakit Tipe B dan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Ricky Indrakari mengatakan, visi RSUD yaitu menjadikan rumah sakit yang unggul dan terpilih sebagai pusat trauma centre di Kota Batam masih jauh dari harapan.

Dia menilai berbagai masalah yang merundung RSUD dua tahun terakhir membuat pelayanan kesehatan untuk masyarakat terganggu dan tidak maksimal.

Hampir 90 persen pasien RSUD Embung Fatimah adalah pasien tanggungan BPJS Kesehatan. Fakta di lapangan banyak keluhan dan pengaduan masyarakat tentang buruknya pelayanan yang kurang baik dan tidak memenuhi standar.

Ke hal 12))

## Satpol PP Awasi THM Tiap Malam

**BATAM KOTA** - Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Batam bakal patroli setiap malam selama Ramadan. Tempat hiburan malam (THM) yang curi-curi kesempatan beroperasi jadi target patroli.

"Untuk memastikan jam operasional THM sesuai aturan yang disepakati," ungkap Kasi Trantib Satpol PP Kota Batam Imam Tohari, kemarin. Dia menyatakan pengawasan THM demi kelancaran umat muslim di Kota Batam dalam menja-

lankan ibadah puasa selama Ramadan. Satpol PP tidak sendiri, mereka menggandeng beberapa instansi terkait. "Kami gandeng TNI, Polri maupun dinas terkait lainnya," sambung Imam.

THM yang melanggar aturan, lanjut dia, akan diberikan sanksi yang datang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Sanksi yang terberat adalah pencabutan izin usaha.

"Kami hanya memberikan reko-

**”** Kami hanya memberikan rekomendasi saja. Sanksinya bisa seperti surat peringatan pertama sampai ketiga atau langsung pencabutan izinnya.

**IMAM TOHARI**  
Kasi Trantib Satpol PP Kota Batam

mendasi saja. Sanksinya bisa seperti surat peringatan pertama sampai ketiga atau langsung pencabutan izinnya," ujar Imam.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Pebrialin menyatakan tidak main-main dengan THM yang melanggar aturan buka tutup selama Ramadan.

Sanksi akan dijatuhkan mulai dari teguran, pembekuan izin usaha sampai penutupan tempat usaha.

Ke hal 12))

## 20 Investor Berminat Garap Hang Nadim

terminal penumpang 2, pembangunan terminal kargo dan perawatan bandara.

Angga menyatakan dengan adanya perluasan kapasitas terminal penumpang bisa sampai 2 kali lipat menjadi 10 juta per tahun. Kapasitas saat ini hanya 5 juta per tahun.

Luas area Bandar Udara adalah 1.762 hektare, dengan sekitar 1.400 hektare masih berpotensi untuk pengembangan.

BP Batam optimistis pengembangan Hang Nadim bisa menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Batam yang ditarget

Hang Nadim (IATA Level of Service 'C').

"Juga akan ada transfer knowledge, baik dari sisi komersial dan operasional BU-BU Hang Nadim dalam hal perencanaan dan pembangunan dari investor. Kami ingin terapkan konsep Logistics Aerocity,"

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema ini dipilih karena percepatan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan tanpa membebani anggaran pemerintah. Dilain pihak, skema ini memungkinkan BP Batam tetap memegang kendali proyek.

han lebih cepat sehingga lalu lintas barang diestimasi akan meningkat pesat," jelas dia.

Selain skema kerja sama, BP Batam disebut-sebut tengah mengodok durasi konsesi pengelolaan terminal baru Hang Nadim.

● ahmad rohmadi

## Satpol PP ...

«Dari hal 9

"Sampai SP 3 (Surat Peringatan. Apabila tidak diindahkan izin usaha dicabut," ujar Pebriatin, kemarin.

Dispar sudah membagikan surat edaran Wali Kota kepada pelaku usaha kepariwisataan yang di dalamnya termasuk hotel, restoran, spa, pub, bar, gelper, panti pijat, karaoke, dan lainnya.

Surat Edaran itu mengatur usaha rekreasi dan jasa hiburan wajib tutup pada H-1 Ramadhan, 1 dan 2 Ramadhan, 16, 17, 18 Ramadhan, serta H-1 Idul Fitri, 1 dan 2 Syawal. Selain dari sembilan malam tersebut, kegiatan di tempat hiburan malam hanya boleh beroperasi mulai pukul 21.00-02.00 WIB.

Sedangkan untuk usaha karaoke keluarga yang tidak menyediakan jasa pemandu lagu dan minuman beralkohol, boleh beroperasi mulai pukul 18.00-

24.00 WIB. Dan spa buka pukul 10.00-22.00 WIB.

Di dalam surat edaran itu, Pemko juga meminta pelaku usaha restoran pujasera tidak menyediakan minuman beralkohol.

Sementara Manajer Centro Hotel Asmungi mendukung aturan pembatasan jam operasional. "Di momen bulan suci ini, kami dapat merasakan suasana yang berbeda sebagai bagian dari hidup bermasyarakat. Tentu dunia usaha ikut mendukung dan menjaga kerukunan umat beragama," kata dia.

Dia menambahkan meski ada perkiraan pendapatan hotel menurun, tapi perusahaan pasti sudah menyiapkan strategi. "Dunia usaha sudah mengantisipasi dan menyiapkan strategi selama Ramadan," tutur dia.

● iwan syahputra/  
reni hikmalia

## Pelayanan RSUD ...

«Dari hal 9

"RSUD Embung Fatimah saat ini membutuhkan seorang pimpinan yang profesional yang dapat menjalankan organisasi RSUD," kata Ricky di DPRD Batam, Rabu (16/5).

Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan, Komisi IV menyarankan Dinas Kesehatan segera menyusun langkah-langkah konkrit. Salah satunya pendelegasian kewenangan ke bidang-bidang terkait, dengan RSUD dan Puskesmas.

Kondisi RSUD juga menjadi gambaran buruknya jaminan

kesehatan di Batam termasuk di kawasan hinterland yang dirasa belum memenuhi standar Kementerian Kesehatan.

Untuk itu Ricky mendorong Pemko segera segera melengkapi sarana dan prasarana alat kesehatan (alkes) maupun tenaga kesehatan sesuai dengan standar di Puskesmas, terutama yang berada di daerah hinterland.

"Sarana prasarana serta tenaga kesehatan tersebut harus sudah sesuai dengan standar sebagaimana diatur oleh Kementerian Kesehatan," jelasnya.

Pemko juga diminta segera mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS demi memenuhi target nasional pada 2019 seluruh warga negara telah terpenuhi dan terlindungi hak mereka atas kesehatan dan pelayanan kesehatan atau disebut dengan JKN Semesta (Universal Health Coverage).

### Daftar Online

Sementara itu Direktur RSUD Embung Fatimah Ani Dewiyana mengatakan RSUD terus

menerus membenahi pelayanan.

Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah pendaftaran pasien secara online demi memudahkan masyarakat. Dengan sistem yang baru, pasien hanya perlu mengirim pesan singkat atau SMS untuk dapatkan jadwal pemeriksaan. "Supaya masyarakat mudah. Pasien berobat tidak antre lama," kata Ani.

Dia mencatat 90 persen pasien RSUD Embung Fatimah adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Setiap hari, antrean pasien peserta BPJS Kesehatan relatif banyak. Sistem pendaftaran elektronik diharapkan dapat mempermudah pasien dalam mengatur waktu berobat sehingga tidak perlu terlalu lama mengantre di rumah sakit,

Selain menggunakan sistem elektronik, Ani mengatakan pihaknya juga akan menambah loket pendaftaran di rumah sakit demi mengurai antrean panjang.

"Bagaimana pasien mudah untuk berobat. Jangan sampai antrean banyak," katanya.

● iwan sahputra

# Pansus LKPJ Beri 40 Rekomendasi

**BATAM KOTA** – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 mengeluarkan 40 rekomendasi terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menanyakan langkah pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD di pertengahan tahun yang lalu, tanpa melakukan koordinasi ke DPRD Batam.

"Mereka membuat perubahan tanpa DPRD. Katanya mereka punya kewenangan (untuk merubah APBD)," kata Nuryanto di DPRD Kota Batam, Senin (14/5).

Pemko, kata dia, seharusnya melibatkan lembaga legislatif dalam merubah anggaran yang sudah disepakati bersama dan dituangkan dalam APBD murni dan perubahan. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri terkait hal tersebut.

"Itu bagian rekomendasi Pansus. Ada 40 poin rekomendasi Pansus yang harus dijalankan Pemko," katanya.

Ketua Pansus LKPJ APBD 2017 Riky Indrakari menambahkan output kinerja pemerintah daerah lemah dalam mengelola program dan anggaran. Sehingga target yang

telah ditetapkan dan disepakati tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"?Kinerja belum dapat target. Akibatnya sekarang anggaran 2018 membiayai yang tertunda salur. Kami masukkan dalam catatan soal infrastruktur itu, pelayanan publik dan kinerja pendapatan," ujar Riky.

Pansus, lanjut dia, menemukan kewajiban pemerintah terhadap pihak ketiga terkait dana tunda salur di bidang tertentu. Namun pihaknya belum mendapatkan penjelasan, apakah tunda salur disebabkan pekerjaan belum selesai sehingga dilakukan perubahan anggaran

secara sepihak.

"Peraturan pemerintah tahun 2018 tentang pengawasan menyebutkan harus ada dasar kuat, seperti bencana alam, untuk melakulan adendum," jelas dia.

Riky menambahkan, dana tunda salur yang dianggarkan tahun 2018 sebanyak Rp74 miliar, setelah menggunakan Silpa tahun lalu sebesar Rp36 miliar dan lainnya.

"Defisit 2017 itu, totalnya Rp198 miliar. Jadi silpa dibuat menutup defisit," kata dia.

Anggota Pansus Dandis Rajagukguk mengatakan, LKPJ Wali Kota tidak terintegrasi. Menurut dia, mereka mendapat penjelasan dari pemerintah

daerah bahwa perubahan APBD karena tidak mencapai target. Sehingga, perencanaan Pemko dinilai sangat tidak baik. "Akibat defisit, membebani APBD murni 2018," ujar Dandis.

Sementara itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi enggan mengomentari rekomendasi dan catatan startegis dari Pansus. Menurut dia, setiap perbaikan yang ditujukan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan diperbaiki ke depannya.

"Terkait perubahan anggaran tanya sama BPKAD (badan pengelolaan keuangan dan aset daerah), bagaimana mekanismenya," tutur dia.

● iwan sahputra